

206

PERKEMBANGAN DAN ARTI ILMU KEPOLISIAN DI INDONESIA

Oleh Drs. Hadi Saputro *)

I. Pendahuluan

1. Karya tulis ini disusun dalam rangka peringatan 50 tahun Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Memang perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PTIK, karena PTIK merupakan satu-satunya wahana di mana cabang ilmu ini dikembangkan.

PTIK mengemban fungsi ganda, yang pertama ialah mula-mula sebagai lembaga pendidikan yang memberikan "akademische vorming" bagi kader-kader kepolisian yang akan mampu mengemban tugas berat di dalam suatu lingkungan masyarakat yang baru saja melepaskan diri dari penguasaan dan penindasan kekuatan asing dan membentuk suatu cita-cita negara (ideal state). Dan fungsi kedua yang kemudian berkembang ialah suatu lembaga-lembaga yang bisa mengembangkan cabang ilmu baru, ilmu kepolisian, yang akan bisa menopang pelaksanaan "mission" yang diletakkan pada bahu para alumnusnya.

Sejarah PTIK selama 50 tahun telah menunjukkan pelaksanaan kedua fungsi tersebut secara sekaligus

(simultan), melalui piranti-piranti yang melekat pada lembaga, antara lain :

- a. Para Dosen yang menanamkan pemahaman lingkup ilmu kepolisian, serta para mahasiswa yang menyerap dan mendalami, sebagai bahan dasar diamalkan dalam praktek kepolisian di kemudian hari.
- b. Perpustakaan PTIK yang menyediakan bahan acuan untuk pengkajian dan penelitian, penyusunan konsep-konsep dan teori-teori dalam berbagai bidang ilmu kepolisian, sehingga memungkinkan upaya pengembangannya.
- c. Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) beserta Kelompok Ahlinya, yang berkewajiban untuk merencanakan dan melakukan kegiatan penelitian praktek kepolisian, yang hasil-hasilnya berfungsi untuk mengembangkan lembaga maupun muatan ilmu, dan memberikan arah pada perkembangannya di kemudian hari.
- d. Majalah ilmu kepolisian "BHA-YANGKARA", sebagai media untuk menampung dan penyebaran gagasan baru mengenai ikhwal kepolisian, baik yang dite-

*) Penulis adalah mantan wadekan dan dosen senior PTIK.

rima dari warga civitas akademi-ka PTIK khususnya para alumni, maupun dari para pemerhati maupun ilmuwan, yang memperkaya materi kandungan ilmunya.

e. Para pengelola lembaga, terutama para Gubernur dan para Dekan PTIK sebagai pembina lembaga dan pembina akademis, yang menentukan arah perkembangan ilmu.

2. Di samping peran lembaga PTIK dalam pengembangan ilmu, peran para praktisi kepolisian, terutama para alumni PTIK, turut menentukan "warna" ilmu kepolisian tumbuh berkembang di Indonesia. Pengkajian teori-teori yang kebanyakan berasal dari khazanah ilmu di dunia Barat dalam praktek, serta penemuan kenyataan di dalam praktek kepolisian (emperi), dapat dipakai untuk menyusun suatu teori Ilmu Kepolisian (pendekatan keilmuan).

3. Perkembangan ilmu juga tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat di mana ilmu itu tumbuh berkembang, agar tidak menghasilkan didikan yang terasing dari lingkungan masyarakatnya. Karena itu falsafah hidup masyarakat harus menjadi dasar pengembangan ilmu, yang dalam bidang ilmu kepolisian akan merupakan landasan berupa falsafah Ilmu Kepolisian.

Demikian lembaga pendidikan, praktek dan lingkungan masyarakat, merupakan 3 unsur berperan di dalam

pertumbuhan ilmu kepolisian di Indonesia, sehingga bisa saja menghasilkan arti dan isi yang tidak sama dengan yang berkembang di negara lain. Mungkin sifat universal dari keilmuannya hanyalah pendekatan ilmiahnya, sedangkan objek studi serta kebenaran-kebenaran keilmuan yang ditemukan berbeda, karena landasan falsafatnya yang berbeda.

II. Perkembangan Di Indonesia (Dalam Perspektif)

1. Periode Embrional, 17 Juni 1946 - 1950

Pada tanggal, 17 Juni 1946 oleh Jawatan Kepolisian Negara didirikan Akademi Polisi di Mertoyudan, Magelang, sebagai wujud dari sekolah Polisi Tinggi yang menerima para lulusan Sekolah Menengah Umum bagian Atas atau yang sederajat sebagai muridnya, sebagai calon Komisar Polisi. Di samping itu juga diresmikan berdirinya Sekolah Polisi Bagian Menengah, yang mendidik para calon inspektur Polisi. Kedua pendidikan tersebut adalah identik dengan Kursus Komisar dan Kursus Inspektur pada zaman Hindia Belanda. Penggunaan istilah Akademi Polisi ini mungkin diinspirasi dengan adanya "Bestuurs Akademi" pada zaman Hindia Belanda atau dengan adanya Kenkoku Gakuin, Sekolah Tinggi Pemerintahan, pada zaman pendudukan Jepang.

Gagasan mendirikan Akademi Polisi berasal dari Kepala Jawatan Kepolisian Negara R.S. Soekanto dan

dari Mr. Djokosoetono sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia, pada waktu mana Jawatan Kepolisian merupakan bagian dari Departemen Dalam Negri yang berkantor di Jakarta. Gagasan ini kemudian berkembang setelah Pemerintah RI beserta alat kelengkapannya pindah ke Yogyakarta, dengan mendapat dukungan dari sejumlah cendekiawan, antara lain Prof. Soepomo, Prof. Soenarjo Kolopaking, Prof. Dr. Priono serta beberapa pejabat pemerintahan. Tujuan pendidikan adalah untuk memberikan "akademische vorming" bagi calon kader Polisi sesuai dengan kebutuhan yang timbul karena transformasi negara dan pemerintah dari sifat pendudukan/penjajahan ke negara yang merdeka dan berdaulat, yang memerlukan tenaga-tenaga penyelenggara pemerintahan yang berpendidikan tinggi. Tidak mengherankan, bahwa pada peresmian berdirinya Akademi Polisi, dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri.

Dalam keadaan masih terisolasi dari perkembangan ilmu dari dunia luar sejak pecahnya perang dunia ke-2 tahun 1940, maka referensi yang dipakai untuk penyusunan Akademi Polisi masih tertumpu pada referensi jaman Hindia Belanda, di mana pendidikan tertinggi untuk Polisi adalah Kursus Komisaris yang berlangsung selama 2 tahun. Pada kursus tersebut tidak dikenal penggunaan istilah Ilmu Kepolisian (Politie Wetenschap). Dalam rencana pelajaran (leerplan)

tertulis sebagai salah satu mata pelajaran adalah pengetahuan tentang Polisi (kennis terzake de Politie) dengan sebutan : Wetenshap pelijke en praktische Speurkunst, yang terjemahannya adalah Ilmu dan praktek Penyidikan. Wetenschappelijke speurkunst di sini sama dengan istilah Wetenschappelijke speurkunst yang identik dengan Kriminalistik, dan bukan dalam arti Politie Wetenshap (pen). Maka dalam pembentukan Akademi Polisi yang ditujukan untuk pembentukan akademis (dengan memberikan wawasan keilmuan yang luas), tidak disinggung dan tidak dipakai istilah Ilmu Kepolisian. Namun di dalam pelaksanaan proses pendidikan, kepada siswa diberikan berbagai pengetahuan tentang kepolisian, di samping juga penugasan-penugasan penelitian lapangan mengenai hal ikhwal kepolisian. Maka sejak itu secara embrional Ilmu Kepolisian mulai ditumbuhkan.

2. Periode Pengkajian 1950 - 1960

Sejak pengakuan kedaulatan Belanda terhadap RI akhir tahun 1949, dan pusat pemerintahan RI pindah ke Jakarta, berakhirilah kurungan isolasi terhadap masyarakat Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1940. Hubungan dengan luar negeri yang mulai terbuka, membawa pula hasil-hasil perkembangan dalam berbagai bidang ilmu, melalui buku-buku maupun tenaga pengajar yang di-datangkan dari luar negeri.

Maka pada tanggal, 1 September

1950, dalam rapat bersama Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar, sebutan Akademi Polisi diubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dengan pertimbangan bahwa :

- a. Sifat pendidikannya yang "universiter" dalam arti penguasaan suatu cabang ilmu dan tidak semata-mata untuk "akademishe vorming" dari para mahasiswanya.
- b. Lembaga pendidikan ini juga mengemban fungsi untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian.

Mulai saat itulah istilah Ilmu Kepolisian pertama kali dipakai dan dimasyarakatkan secara umum maupun di kalangan kehidupan perguruan tinggi. Di dalam forum Konsortium Ilmu Pengetahuan, Prof. Mr. Djokosoetono berjuang keras untuk menerangkan eksistensinya, namun tidak pernah berhasil mendapat pengakuan secara formal oleh Konsortium dan oleh Departemen pendidikan, meskipun para tenaga pengajar PTIK hampir semua berasal dari Universitas Indonesia, malahan beberapa mata kuliah diikuti secara bersama oleh mahasiswa dari kedua perguruan tinggi. Yang diakui hanyalah "civil effect" dari lulusan PTIK yang disamakan dengan lulusan Universitas, berdasarkan Ketetapan MPRS No. 11/1960.

Maka sejak 1950 dimulailah pengkajian terhadap Ilmu Kepolisian, baik keberadaannya sebagai cabang ilmu yang baru, maupun muatan ilmunya. Prof. Mr. Djokosoetono

memberikan arti Ilmu Kepolisian sama dengan istilah Police Sciences atau Politie Wetenschappen, ialah gabungan dari semua pengetahuan tentang Polisi (sebagai Lembaga) yang disistematisir menjadi suatu ilmu, dan bukan sebagai terjemahan dari Police Science yang lebih banyak mengandung arti yang sama dengan Kriminalistik. Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking menguraikan kedudukan Politie di dalam tatanan negara yang modern, sebagai latar belakang untuk membenarkan tumbuhnya Ilmu Kepolisian.

Sejak itu pula mulai diterbitkan majalah "Bhayangkara" yang dikelola oleh para mahasiswa PTIK, sebagai media untuk melontarkan gagasan-gagasan tentang Ilmu Kepolisian, dan juga sebagai media untuk memperjuangkan status lembaga Kepolisian di dalam tatanan pemerintah RI. Di samping penugasan penelitian kepolisian, oleh Prof. Mr. Soenaryo diberi arahan kepada sementara lulusan PTIK untuk mempersiapkan diri membuat disertasi dalam berbagai aspek kehidupan kepolisian.

Sementara itu dilakukan pembenahan terhadap susunan kurikulum PTIK, sehingga nampak bisa menampilkan sifat keilmuan kepolisianannya, yang menyangkut aspek-aspek hukum, sosial/budaya, administrasi serta teknik-teknik dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian. Sejalan dengan itu mulailah dikirimkan kader kepolisian ke luar negeri,

terutama ke Amerika Serikat, untuk mendalami berbagai aspek dari Ilmu Kepolisian.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri pentingnya dalam pengkajian ilmu dalam periode ini ialah lahirnya Tribrata tahun 1954, yang kemudian dijadikan ialah satu sumber bagi pemahaman Falsafah Ilmu Kepolisian, satu sisi yang mutlak untuk keberadaan ilmunya.

Dengan bahan materi yang terkumpul selama perkembangan dalam periode ini, maka selanjutnya perkembangannya memasuki babak berikutnya, ialah upaya untuk lebih mengkongkritkan sosok ilmu kepolisian berupa konsep-konsep tentang ilmu kepolisian di Indonesia.

3. Periode Menyusun Konsep Ilmu 1960 - 1970

Dalam kurun waktu dua dasawarsa terjadi peralihan peran dari generasi pra perang dunia ke-2 (1940) dalam bidang keilmuan maupun dalam kekuasaan formal kegenerasi penggantinya. Golongan intelektual lulusan universitas dalam negeri maupun luar negeri menampilkan diri dengan sikap dalam pendekatan terhadap ilmu yang lebih toleran dan pragmatis tentang kegunaan ilmu bagi masyarakat, meskipun tetap pada unsur-unsur pokoknya, yaitu mengenai objek studinya yang bersifat empiris, metodologi ilmiah di dalam pengkajiannya untuk menemukan kebenaran-kebenaran ilmiahnya.

Sikap tersebut juga ditujukan terhadap pertumbuhan ilmu-ilmu baru, di antaranya ialah ilmu kepolisian. Peralihan juga terjadi dalam lingkungan kuasa formal (birokrasi) di kalangan kepolisian, di mana alumni PTIK mulai menduduki jabatan-jabatan kunci. Maka dalam periode ini tidak lagi dipersoalkan keabsahan ilmu kepolisian sebagai cabang ilmu, tetapi lebih dititik beratkan apa isi atau meteri dari ilmu tersebut. Maka dalam periode ini muncul berbagai konsep ilmu kepolisian yang diajukan terutama oleh para alumni PTIK, untuk menyebut beberapa di antaranya ialah dari Soebadi, Hadi Saputro, Bagoes Moedjajadi, Moersaleh, Soetjipno, yang mempunyai kesamaan dalam penentuan objek studinya ialah lembaga kepolisian, penggunaan pendekatan yang cenderung kependekatan monodisipliner. Sementara itu juga muncul tulisan-tulisan mengenai ilmu kepolisian dalam bentuk buku (Wahyudi : pendekatan antropologis dalam tugas Polisi), maupun sebagai hasil kajian yang dituangkan dalam bentuk skripsi mahasiswa PTIK, antara lain dari Soekawadi, Farouk dan Gurning.

Sekitar tahun 1978 dibentuklah Panitia untuk merumuskan arti dan isi dari ilmu kepolisian yang dipimpin oleh Wakil Dekan Drs. Hadi Saputro dan anggotanya terdiri dari para alumni PTIK yang sudah mempunyai konsep maupun yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan ilmu tersebut dan juga diper-

kuat dengan be-berapa Guru Besar di kalangan PTIK, antara lain Prof. Dr. Siagian. Kegiatan Panitia selama hampir 2 tahun tidak berhasil merumuskan satu pengertian tentang ilmu kepolisian, yang dihasilkan adalah konsep, di mana konsep dari Moersaleh dan Bagoes Moedjadi ternyata yang paling lengkap dalam penyusunannya.

4. Periode Pematapan Ilmu Kepolisian (1980 - 1996)

Dalam bulan Maret 1980 dibentuk Panitia Bersama, di mana para anggotanya ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Awaludin Djamin yang mewakili Polri terdiri dari Wakil Dekan Drs. Hadi Saputro sebagai Ketua, dan Drs. Juhanda, Drs. Soedarto dan Drs. Moch. Sanusi sebagai anggota, dan oleh Dirjen Dekti untuk mewakili Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Prof. Padmowahjono, S.H., Prof. Dr. Soejoedi. Panitia bertugas untuk mengkaji adanya Ilmu Kepolisian dan menyusun konsep kerja sama antara Polri dan Dep. Dikbud untuk mengelola PTIK serta upaya pengembangan lembaga dan ilmunya.

Dalam Panitia ini keberadaan Ilmu Kepolisian diterima sebagai disiplin ilmu, dengan demikian mengabsahkan keberadaan Perguruan Tinggi yang mengadakan program studi tentang ilmu tersebut, yang pembinaan akademisnya diserahkan kepada Universitas Indonesia dengan menunjuk seorang Guru Besar seba-

gai Dekannya. Dan ditunjuk sebagai Dekan PTIK ialah Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar.

Pada pelantikan Dekan PTIK dan wisuda sarjana bulan Agustus 1980 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Daud Jusuf dalam pidatonya menegaskan adanya cabang ilmu baru, ilmu kepolisian, dan bahwa metode di dalam mendalami cabang ilmu ini adalah metode pendekatan interdisipliner melalui tahapan multi, cros dan transdisipliner.

Pada pidato Dies natalis ke-35 PTIK tahun 1981 yang berjudul PTIK, Masa lampau dan masa yang akan datang, Dekan PTIK menguraikan konsepsinya tentang Ilmu Kepolisian yang mempunyai banyak cabang-cabangnya yang menunjukkan hasil kajian dari semua golongan ilmu, ialah dari ilmu alamiah dan teknologi, ilmu sosial dan ilmu budaya. Pengembangan ilmu kepolisian harus dilakukan melalui metode interdisipliner, yang pada waktu itu baru memasuki pengkajian melalui metode multidisipler. Sebagai penjelasan mengenai konsepsinya Prof, Dr. Harsya W. Bachtiar menggambarkan tumbuhnya ilmu kepolisian di Indonesia dengan batang pohon dan akar-akarnya. Batang pohon menunjukkan pada ilmu kepolisian, sedang akar-akarnya adalah pengetahuan tentang kepolisian yang didapatkan dalam praktek melalui pemahaman berdasar disiplin ilmu tertentu. Akar-

akar yang menimbulkan disiplin-disiplin ini yang harus dipakai untuk menumbuhkan batang pohonnya (multidisipliner).

Jelas bahwa konsep Harsya W. Bachtiar berbeda sekali dengan konsep Moersaleh, terutama dalam metodologi pendekatannya. Dalam konsep Moersaleh terdapat kejelasan mengenai objek studinya, yaitu "Hal ikhwal kepolisisan" (ia juga memakai istilah Pilisiologi), yang dikaji dengan memakai disiplin ilmu kepolisian (monodisipliner). Namun dengan konsep ini tidak mudah dicerna makna dari "pendekatan ilmu kepolisian" terhadap "hal ikhwal kepolisian", serta sukar untuk diterangkan adanya mata kuliah seperti administrasi/manajemen kepolisian, psikologi kepolisian, falsafah kepolisian dan lain sebagainya dari sudut pandang monodisipliner. Sedangkan dengan konsep Harsya W. Bachtiar, meskipun tidak dijelaskan tentang objek studi ilmu kepolisian, namun dapat dimengerti bahwa dalam mempelajari fenomena masyarakat yang berkaitan dengan adanya fungsi dan lembaga kepolisian, dan aspek-aspek tertentu dalam fenomena tersebut yang hanya bisa dipelajari melalui penggunaan disiplin ilmu tertentu. Harsya W. Bachtiar yang mengaku dirinya bukan ahli ilmu kepolisian, dengan jalan itu memaksa kita (para dosen dan alumni) untuk menyusun atau merumuskan apa yang harus dijadikan objek studi ilmu, dan dengan pendekatan multi-

disipliner untuk menyusun cabang-cabang dalam ilmu kepolisian, yang kemudian akan menjadi materi kurikulum dalam program studi ilmu kepolisian. Dan dengan penyusunan mata kuliah dalam program studi, menunjukkan kumpulan cabang-cabang ilmu yang secara keseluruhan merupakan ilmu kepolisian.

Sejak itu penyusunan konsep ilmu kepolisian lebih jelas terarah, meskipun masih menampakkan tampilan cabang dalam ilmu kepolisian yang seolah-olah berdiri sendiri, tidak adanya hubungan dengan cabang lainnya, sebagai akibat pendekatan secara monodisipliner. Hal ini juga diakui oleh Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, ialah merupakan babak pertama dalam pertumbuhan ilmu, untuk nantinya bisa masuk ke babak berikutnya berdasarkan pendekatan krosdisipliner.

Bersamaan dengan masuknya Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar sebagai Dekan PTIK, oleh Kapolri diberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan di PTIK, yaitu bahwa lulusan PTIK diarahkan untuk mampu menduduki jabatan manajer menengah dalam jajaran Polri, sehingga pengajaran juga harus diarahkan untuk memberikan kemampuan yang diperlukan (pendekatan penugasan). Karena itu di dalam menyusun kurikulum secara sadar diarahkan untuk membekali pengetahuan yang akan memberikan kemampuan mereka dalam penugasan tersebut, sehingga susunan kurikulum menampakkan sejumlah mata

kuliah dalam bidang administrasi/ manajemen yang dalam jumlah mendominasi mata kuliah lainnya. Hal mana sebenarnya sudah menunjukkan adanya pendekatan crossdisipliner (salah satu disiplin ilmu yang perannya lebih dominan).

Demikianlah perjalanan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia sejak embrional sebagai kumpulan pengetahuan, yang kemudian diarahkan untuk menyusun ilmu kepolisian sebagai cabang ilmu baru melalui tahap-tahap pengkajian, penyusunan konsep-konsep dan pematapan tentang konsep yang akan terus dikembangkan. Ilmu pengetahuan terus berkembang, tidak akan pernah mencapai tahap final, selalu bersifat tentatif untuk menemukan hal-hal yang baru yang bisa dikembangkan untuk penyempurnaannya.

III. Perkembangan Dan Arti Ilmu Kepolisian Di Barat (suatu perbandingan)

Istilah Ilmu Kepolisian adalah terjemahan dari istilah Politie Wetenschap (pen) (Belanda) atau Police Science (s) bahasa Inggris.

1. Perkembangan di Jerman dan Belanda

Menurut Dr. F. Fijnaut (pernah memberikan ceramah di PTIK), Polizeiwissenschaft (Ilmu Kepolisian) sejak pertengahan abad ke-18 telah dikenal di Jerman sebagai bagian dari Kameralwissenschaften, di samping bagian lain-lain, yaitu "Oekonomik

dan Finanzwissenschaft, dan diajarkan dalam beberapa universitas. Polizei pada waktu itu masih mengandung arti penyelenggaraan kepentingan umum (Wohlfahrt) yang meliputi pemerintah dan perundang-undangan. Pada akhir abad ke-18 Polizeiwissenschaft memisahkan diri dari Kameralwissenschaften untuk berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sesuai dengan perkembangan ilmu politik dengan dibedakannya pengertian Wohlfahrt polizei dan Sicherheitspolizei, maka objek studi Polizeiwissenschaft beralih ke Sicherheitspolizei, yaitu penyelenggara pencegahan bahaya terhadap warga masyarakat. Bersamaan dengan itu juga mulai berkembang Polizeirecht, yang mempelajari aspek hukum daripada keberadaan aparat polisi serta wewenangnya. Dengan munculnya M. Weber dengan teori organisasi, maka studi polisi ditujukan pada aspek penyusunan (organisasi) dan kegiatan operasionalnya. Kemudian dilanjutkan dengan studi kriminologis yang mengarah kedua jurusan, pertama yang berorientasi pada ilmu-ilmu alamiah dan segi-segi teknis, yang melahirkan Kriminalistik (wissenschaftliche Polizei, Police Scientifique), dan jurusan yang menggunakan ilmu-ilmu sosial (menswetenschappelijk) yang menumbuhkan Antropologi kepolisian. Maka dengan perkembangan sampai pertengahan abad ke-19 ini, Polizeiwissenschaft (yang "asli") hancur dan terpecah-pecah dalam beberapa cabang il-

mu, di mana objek studinya (Polisi) dipecah-pecah (dikapling). Dengan ucapan C. Fijnaut : " in de tweede helft van de 19 eeuw ging de Politiewetenschap tenonder in een veelheid van nieuwe wetenschappen waartussen haar meterieel objekt werd verkaveld" (terjemahan : dalam pertengahan kedua dari abad ke-19 Ilmu Kepolisian hancur, di mana objek studinya dikapling dan menimbulkan ilmu-ilmu baru). Dengan demikian timbul istilah *Polizeiwissenschaften*, *Politiewetenschappen* (Belanda) atau *Police Sciences* (Inggris), di samping adanya *Kriminalistik* (*Wissenschaftlichen Polizei*, *Police Scientifique* atau *Police Science*).

Dengan demikian nampak, bahwa Ilmu Kepolisian telah berkembang dengan menggunakan metode multidisipliner yang mengandung beberapa cabangnya, di antara menurut C. Fijnaut adalah :

- a. "Staatkundige Politie Wetenschap" yang mempelajari Polisi dari pendekatan hukum-hukum negara.
- b. "Menswetenschappelijke Politie wetenschap" yang didasarkan kepada pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial.
- c. "Technologische Politie Wetenschap", yang mengandung arti identik dengan *Kriminalistik* (*Police Science*), dan juga teknik-teknik, (cara-cara lembaga Polisi melakukan tugasnya).
- d. "Historische Politie Wetenschap" yang mempelajari Polisi secara

- sosial historis, dan juga sejarah perkembangan ilmunya.
- e. "Comperatieve Politie Wetenschap", ialah studi perbandingan antara berbagai aparat kepolisian di dunia.

Mr. Peter van Lochum menggunakan istilah *Politiekunde* untuk ilmu kepolisian. Istilah "Kunde" menunjuk pada pengertian "Ilmu", seperti pemakaian dalam istilah-istilah *Aardijkskunde* (ilmu bumi), *Meetkunde* (ilmu ukur), *Dierkunde* (ilmu hewan), *Bedrijfskunde* (ilmu perusahaan) dan kunde lainnya. Ia menganggap *Politiekunde* sebagai studi yang integral, dan merupakan suatu pembenaran untuk adanya disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Di dalamnya juga memuat tentang teori dan praktik Polisi mengandung pengertian "keahlian". *Politiekunde* sebagai studi Polisi akan mengarah kependekatan monodisipliner, di mana dalam ilmu tentang Polisi ini mengandung tiga fungsi :

- a. "Ordende fungsi" yaitu fungsi menyusun dan mensistematisir produk-produk ilmiah yang telah dihasilkan.
- b. "Theorie-vormende fungsi" atau fungsi menyusun teori tentang Polisi yang mengandung azas-azas fundamental dan keteraturan yang terdapat pada fenomena Polisi.
- c. "Vertalende fungsi" atau fungsi menerjemahkan, dalam arti menguraikan ilmu-ilmu di luar

Polisi, apabila perkembangannya mempunyai arti untuk studi Polisi.

2. Perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat.

Di Inggris dan Amerika Serikat istilah Police Science lebih dititik beratkan pada arti "Modern techniq of Crime Investigation", sama dengan istilah "Wetenschappelijke Spreekunst" yang dipakai di Belanda untuk mengacu pada bidang Kriminalistik. Di Inggris ada "Police Studies" yang melakukan pengkajian terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kepolisian; malahan di London ada lembaga "Police Studies" yang merupakan program pendidikan yang memberikan gelar kesarjanaan sampai strata 2, namun dengan memakai sebutan gelar Magister Management (M.M.), bukan Magister in Police Science. Di Inggris juga terdapat Police College di Bramshil, namun sifatnya lebih banyak sebagai "training institution" untuk 5 macam tingkatan/golongan pimpinan Polisi yang berlangsung selama 4 bulan dan materi pelajarannya dititik beratkan pada manajemen dan kepemimpinan, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai lembaga pendidikan untuk pengembangan ilmu kepolisian.

Di Amerika Serikat studi tentang Polisi berlangsung sangat cepat, yang didorong oleh beberapa sebab, antara lain.

a. Meningkatnya kejahatan.

b. Kekhawatiran penduduk terhadap kuasa Polisi yang dianggap bisa membahayakan hak-hak sipilnya.

c. Keinginan membentuk aparat kepolisian yang efektif, yang bisa memberi perlindungan dan pelayanan terhadap publik.

Studi mula-mula ditujukan pada lembaganya, yang menghasilkan produk tulisan mengenai teknik-teknik kepolisian, terutama yang menyangkut sarana yang dipakai, kemudian terbitan mengenai administrasi dan sistem kepolisian, dan hasil pengkajian terhadap segala aspek mengenai kehidupan kepolisian, yang kesemuanya menunjukkan penggunaan berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari berbagai aspek dari fenomena Polisi, sehingga menumbuhkan cabang-cabang ilmu yang berdiri sendiri dalam kanzah ilmu kepolisian. Jelas bahwa ilmu kepolisian di sini diartikan dalam istilah "Police Sciences", di antara mana terdapat "Police Science" dalam artian yang sempit ialah kriminalistik. Mengenai istilah "Police Science" sendiri juga terdapat beberapa faham antara lain sebagai kriminalistik atau police technology (misalnya Journal of Police Science and Administration), sebagai disiplin ilmu yang menunggal/mono (Perkins; Elements of Police Sciences), sebagai kumpulan ilmu-ilmu perihal Polisi (Riddle) atau Politiewetenschappen, dan sebagai pengetahuan tentang Polisi (J. Sullivan : Introduction to Police Science). Sullivan pernah

mengunjungi perpustakaan PTIK. Ada upaya untuk memberikan dasar bagi adanya mono disiplin ilmu kepolisian, ialah dengan menyusun teori tentang Polisi, seperti teori Social Control, teori Fungsional, teori Label, teori Konflik dan teori pertukaran (exchange).

Program studi tentang Polisi banyak diadakan di berbagai universitas secara terpisah, namun terbatas pada salah satu aspeknya saja, dengan sebutan program studi yang berbeda, misalnya Law Enforcement, Public Safety, Criminal Justice, Police Administration dan lain-lain sebutan.

Jelas bahwa belum terdapat kesefahaman tentang arti Ilmu Kepolisian, namun objek studinya telah meluas menyangkut segala aspek sosial budaya dari lingkungan aparat Polisi, sehingga menunjukkan pendekatan secara multi disipliner yang sangat dominan.

IV. Ilmu Kepolisian yang dikembangkan di PTIK : Ma'zab PTIK

Sebagai disinggung di atas, ilmu selalu berkembang, bersifat tentatif dan tidak pernah akan mencapai tahap yang final dan selalu harus menghadapi pengkajian (falsifikasi). Viri Doktisine Disentuant, pendapat para ahli selalu berbeda-beda. Setiap ahli atau cendekiawan berhak mengemukakan pendapatnya mengenai sesuatu fenomena dalam bentuk suatu konsep ataupun teori. Karena itu

terdapat berbagai teori dan aliran (school, ma'zab) dalam berbagai bidang ilmu. Demikian pula dalam bidang ilmu kepolisian. Dalam Bab III kita lihat berbagai faham di dunia Barat. Dalam Bab II secara sepintas juga tumbuh beberapa konsep yang tumbuh berkembang di kalangan sivitas akademika PTIK. Hal tersebut adalah wajar-wajar saja.

Masalahnya ialah : faham apa yang harus dikembangkan di lembaga PTIK, di mana PTIK mempunyai posisi sebagai satu-satunya wahana yang mengembangkan ilmu tersebut di Indonesia, yang mempunyai muatan ilmu yang mungkin berbeda, dan harus menjadi referensi untuk para dosen pengajar serta personil lembaga dalam pemahaman ilmu kepolisian yang akan disampaikan kepada para mahasiswa asuhannya. Sebutkanlah faham ini sebagai Ma'zab PTIK (Indonesia) tentang Ilmu Kepolisian. (bandingkan dengan beberapa aliran (school) dalam bidang ilmu ekonomi yang dikembangkan di universitas : London, Berkley, Amsterdam).

Dalam Bab II tulisan ini telah diuraikan perkembangan ilmu kepolisian di Indonesia yang telah mencapai tahap pemantapan, di mana Prof. Dr. Marsya W. Bachtiar almarhum sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar untuk penyusunannya. Buah fikirannya dipublikasikan melalui bukunya : Ilmu Kepolisian, suatu cabang "Ilmu Pengetahuan

Baru", Penerbit Grasindo, tahun 1994. Dengan memakai buku ini sebagai acuan pokok, dan dengan bahan-bahan acuan lain yang terdapat selama sejarah PTIK, maka Ilmu Kepolisian yang dikembangkan di PTIK harus mempunyai muatan :

1. Objek studi yang jelas :

Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar sangat hati-hati dalam menyusun bukunya dengan tidak menyebut secara tersurat (eksplisit) apa yang menjadi objek pengkajian ilmu kepolisian. Namun dengan mengemukakan metodologi pengkajian dengan pendekatan interdisipliner menunjukkan, bahwa objek pengkajian ini mengandung banyak aspek, yang masing-masing memerlukan pengkajian secara tersendiri. Dalam Panitia PTIK th. 1979 terdapat berbagai rumusan tentang objek studinya, yang berkisar terbatas pada Lembaga Polisi saja, sampai yang sifatnya lebih luas dengan berbagai sebutan : hal-ikwal Polisi (Polisiologi), Public safety (keamanan umum), dan masalah menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat, disingkat dengan Kamtibmas, suatu istilah yang sudah mulai memasyarakat pada waktu itu. (Ada seminar Kamtibmas tahun 1976 di mana penulis bertindak sebagai Project Officer). Objek pengkajian tersebut terakhir dengan berbagai rumusannya yang diajukan oleh Soeparno Soeriaatmadja, Bagoes Mudjajadi, Moch. Sanusi, kiranya patut ditentukan sebagai objek studinya dengan

menyempurnakan perumusannya sebagai : "Fenomena masyarakat tentang upaya warganya memenuhi kebutuhan akan keamanan dan ketertiban bagi dirinya dan lingkungannya, ditujukan terhadap gejala-gejala yang membahayakan keselamatan dan ketentraman hidupnya".

Perumusan tersebut akan membawa manfaat, ialah :

- a. Fenomena tersebut sebenarnya adalah suatu ungkapan dari falsafah hidup manusia Indonesia "Tata Tenram Kerta Raharja", sehingga memberikan warna ke-Indonesiaan pada ilmu yang mengkajinya, dan sekaligus memberikan Falsafah Ilmunya sebagai batang penyangga dari pohon ilmunya (science tree), yaitu Falsafah (Ilmu) Kepolisian.
- b. Istilah "keselamatan" adalah identik dengan istilah "Sicherheit" sebagai arti Polisi dalam perkembangan terakhirnya, sehingga dapat dibenarkan penggunaan istilah Ilmu "Kepolisian", yang mempelajari upaya manusia untuk "Mem-Polisi-i" (istilah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.) lingkungannya.
- c. Rumusan tersebut mengandung banyak aspek yang berkaitan merupakan suatu "sistem", di mana masing-masing aspek perlu dikaji, sehingga menunjukkan kerangka dan lingkup dari ilmu kepolisian, dan tersusun sebagai

Teori Ilmu Kepolisian. Dengan demikian objek pengkajian bisa disebut dengan satu istilah yaitu "Siskamtibmas", yang isinya adalah sebagai rumusan di atas.

2. Kerangka Ilmu : Teori Ilmu Kepolisian

Kerangka (framework) merupakan aspek-aspek atau faset-faset (bagian) penting yang menunjukkan akan batasan serta isinya, dari suatu satuan (entity), baik yang berupa barang ataupun konsep. Ilmu sebagai suatu konsep "body of knowledge" juga mempunyai kerangkanya.

Siskamtibmas sebagai objek pengkajian ilmu kepolisian mengandung unsur-unsur berikut :

a. *Unsur manusia*

Dalam Siskamtibmas manusia bertindak selaku pelaku, baik secara perorangan maupun berkelompok atau secara institusional dalam upaya pengamanan diri dan lingkungannya. Kualitas dari upayanya banyak tergantung pada kepribadiannya (sifat, sikap dan kecenderungan) dan sifat-sifat lain yang ada padanya. Manusia juga berperan sebagai sasaran (objek) dari sesama manusianya apabila ia menjadi sumber gangguan dari ketentraman hidup lingkungannya.

b. *Unsur lingkungan*

Manusia hidup bermasyarakat dalam keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan turut menentukan perilaku manusia, dapat

mengandung benih-benih timbulnya gangguan, dapat mempengaruhi aparat keamanan dalam cara bertindak.

c. *Unsur kelembagaan*

Hal ini menyangkut lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat maupun lembaga formal yang dibentuk Negara, di mana Polisi Negara menempati kedudukan sentral di samping lembaga-lembaga lainnya (dalam sistem peradilan kriminal).

d. *Unsur kegiatan atau prosesnya*

Upaya kegiatan bisa dilakukan menurut sistem tertentu (Sistem Swakarsa, Community polising dan lain sistem, dengan cara-cara pendekatan tertentu yang sesuai dengan masalah yang dihadapi (reaktif, proaktif, preemtif dan lain bentuk).

e. *Unsur sarana yang dipakai*

Baik yang berupa sarana lunak (peraturan, wewenang) maupun sarana keras yang berupa alat-alat yang dipakai sebagai alat pendukung maupun sebagai alat pemaksa.

f. *Sasaran dari kegiatan*

Ialah gejala-gejala yang bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang atau masyarakat yang bersumber pada masyarakat dan lingkungan sendiri maupun yang bersumber pada lembaga-lembaga (hazard, konflik).

g. *Tujuan yang hendak dicapai*

Tujuan adalah menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif untuk

memungkinkan adanya kegiatan/ke-sibukan (kerta) dalam rangka menca-pai kesejahteraan diri dan lingkung-an Raharja.

Segala unsur tersebut di atas menjadi objek pengkajian yang akan menghasilkan berbagai cabang ilmu, yang kesemuanya menunjukkan ba-tasan-batasan dan muatan/isi dari Il-mu Kepolisian, atau keseluruhan ke-rangka dari Ilmu Kepolisian.

Dengan memakai rumusan ten-tang istilah Teori dari Pfiffner & Sher-wood : bahwa teori adalah : "Kese-luruhan kerangka (total framework) di mana semua faset (aspek/unsur) dari fenomena, disusun dalam suatu tatanan yang berarti", maka kerangka dari Ilmu Kepolisian tersebut bisa diartikan juga sebagai Teori Ilmu Kepolisian. Hal ini bisa dipakai pada tahap perkembangan ilmu yang masih dominan bersifat monodisipliner pada dewasa ini. Apabila kemudian perkembangan ilmunya sudah men-capai tahapan transdidipliner menuju ke monodisipliner, kemungkinan sudah bisa diketemukan kebenaran-ke-benaran ilmu yang bersifat menung-gal pada Ilmu Kepolisian, sehingga bisa dipakai sebagai Asas-asas dari Ilmu Kepolisian. Pada tahapan itu bisa diberikan arti pada Teori Ilmu Ke-polisian, ialah "Asas-asas yang tersu-sun secara sistematis" dari Ilmu Ke-polisian.

3. Metode pengkajian pendekatan interdisipliner

Sesuai dengan sejarah perkem-bangan Ilmu Kepolisian di Indonesia dan perkembangan selanjutnya, ma-ka metode yang dipakai untuk meng-kaji objeknya adalah metode interdi-sipliner (Harsya, W. Bachtiar, D. Jusuf), dengan menggunakan cabang-cabang ilmu dalam kelompok ilmu-ilmu so-sial, alamiah dan budaya yang relevan untuk mengkaji unsur-unsur dari ob-jek dalam kaitan satu sama lain. Da-lam hal ini disiplin ilmu yang paling berperan dalam pengkajiannya ada-lah :

a. *Ilmu Administrasi* : terhadap lembaga termasuk unsur manu-sianya, proses termasuk cara-cara pelaksanaannya, sehingga me-numbuhkan cabang (dalam pe-ngertian susunan pohon ilmu) seperti :

- 1) Teori tentang Polisi di Indo-nesia (di samping teori-teori yang telah dikenal dalam literatur Barat, Bailey, Sykes, S, Souryal)
- 2) Adminsitrasi dan Manaje-men kepolisian dalam bentuk teori
- 3) Organisasi kepolisian
- 4) Perbandingan sistem (orga-nisasi) kepolisian.

b. *Ilmu Hukum* : terhadap status, kewenangan serta produk-produk hukum sebagai piranti lunaknya, yang akan menghasilkan :

- 1) Teori Hukum Kepolisian
- 2) Hukum Kepolisian Positif

(Positief Politie Recht), termasuk di dalamnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, suatu aspek dari teknologi kepolisian sebagai sarana hukum yang dipakai.

c. *Sosiologi* : terhadap lingkungan di mana lembaga berada, yang berkaitan dengan hubungannya dengan lembaga kepolisian (Police Community Relations), yang membuahkan : Sosiologi kepolisian.

d. *Kriminologi* : terhadap perilaku manusia baik dalam lingkungan kehidupan masyarakat maupun yang berada dalam lingkungan lembaga, yang akan menumbuhkan gejala-gejala yang membahayakan ketentraman hidup masyarakat berupa konflik (Prayudi) ataupun Hazards (Hadi Saputro) baik yang eksternal (sosiatal) maupun yang internal berbentuk "Police Corruption and Police Brutality", yang bisa disebut :

- 1) Ekologi Kepolisian (studi tentang hazard, konflik)
- 2) Kriminologi kepolisian (studi tentang penyimpangan-penyimpangan kepolisian).

e. *Antropologi* ; studi tentang budaya, adat istiadat, kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat maupun konflik dengan norma-norma umum yang berlaku (rechts-konflik), misalnya

budaya warok, sirik, carok, jagoan, jawara, maglandang dan lain-lain, yang selalu harus diperhatikan dan diantisipasi oleh lembaga kepolisian, sebutkan saja cabang ilmu ini adalah : Antropologi kepolisian.

f. *Psikologi* : studi tentang latar belakang kejiwaan seseorang yang tumbuh dan mendasari perilakunya, berbentuk :

- 1) Psikologi Kriminal, mengenai kejiwaan orang-orang jahat
- 2) Psikologi Kepolisian, ialah kepribadian yang tumbuh pada seseorang karena pengaruh lingkungan pekerjaan Polisi, yang menumbuhkan Budaya Polisi (Police Culture).

g. *Budaya* : studi tentang sifat normatif anggota Polisi yang diharuskan karena sifat lembaga dan tugasnya, yang akan membentuk Code Etik dari lembaga, dengan sebutan : Etika Kepolisian. Mengandung sistem nilai yang mendasari identitas Polisi.

h. *Teknologi* : penggunaan ilmu-ilmu alamiah terhadap cara dan sarana yang dipakai lembaga untuk mengungkap perilaku kriminal, ialah teknologi kepolisian yang meliputi :

- 1). Ilmu kriminalistik (Criminalistics, Police Science).
- 2). Forensik kepolisian, ialah penggunaan ilmu kedokteran forensik untuk mengungkap suatu peristiwa pidana.

i. *Ilmu Komunikasi* : terhadap saluran informasi yang tersusun di dalam lembaga maupun antar lembaga dengan masyarakat, yang sangat vital untuk pengenalan tumbuhnya konflik, hazard dan perilaku menyimpang, dan tindakan antisipatif yang harus dilakukan oleh lembaga, ialah : Sistem komunikasi kepolisian (Police Communication System).

j. *Ilmu Sejarah* : terhadap tumbuhnya fungsi dan lembaga kepolisian, terutama yang berlangsung di Indonesia, ialah : Sejarah kepolisian.

Demikianlah tumbuhnya cabang-cabang dalam Ilmu Kepolisian, yang menjadi Kurikulum inti (Core curriculum) dalam studi Siskamtibmas, dan tersusun dalam Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah Keahlian (MKK) dan Mata Kuliah Pendalaman (MKPd) dan Mata Kuliah Pembulatan Studinya (MKPb) yang berbentuk penulisan skripsi, tesis atau disertasi harus mengandung salah satu dari materi cabang ilmu kepolisian yang ada.

4. Pohon Ilmu Kepolisian

Dengan tersusunnya Ilmu Kepolisian yang terdiri dari dua bagian, yaitu Falsafah dan Teori (Ilmu) Kepolisian, yang mencerminkan adanya berbagai cabang dalam Ilmu Kepolisian, maka telah dapat disusun Pohon Ilmu Kepolisian yang terdiri atas 3 strata, yaitu :

a. Akar-akar yang menggambarkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari pengkajian terhadap objek studinya. Sebagai akar utama Falsafah (terlepas dari pendapat apakah falsafat digolongkan sebagai ilmu atau tidak) yang mencari dasar kebenaran hakiki dari fenomena Kamtibmas, dan ilmu-ilmu alamiah, sosial dan civics, yang sekaligus menunjukkan pendekatan pengkajian secara interdisipliner.

b. Batang Ilmu, ialah hasil pengkajian kefalsafahan terhadap objek ilmu, ialah berupa Falsafah (Ilmu) Kepolisian.

c. Cabang-cabang Ilmu, yang menunjukkan hasil-hasil kajiannya secara interdisipliner. Cabang ilmu nantinya dapat dirinci dalam ranting-ranting keilmuan yang sarat dengan daunnya yang menunjukkan kefaktor-faktor variabelnya.

Dengan demikian Pohon Ilmu Kepolisian sekaligus juga bisa di anggap sebagai Sistem Ilmu Kepolisian.

5. Kebenaran Keilmuan

Dengan pendekatan interdisipliner pada tahapan monodisipliner sekarang (paling-paling baru mendekati tahap krosdisipliner), kebenaran-kebenaran keilmuan didapatkan pada tiap cabang ilmu secara terpisah-pisah, sehingga bisa dipakai untuk menyusun teori bagi masing-masing cabang seperti telah disebut-

kan beberapa di antaranya, ialah Teori Polisi, Teori Administrasi/Manajemen Kepolisian, Teori Hukum Kepolisian, dan teori-teori dalam cabang lain hasil pengkajiannya.

Apabila pengkajian telah mendekati pemahaman ilmu secara monodisipliner, tentunya harus bisa diketemukan kebenaran umum, yang menjadi Asas-asas Ilmu Kepolisian. Hal ini tergantung pada pengembangan ilmu melalui pengkajian dan penelitian.

V. Pengembangan Ilmu Kepolisian : Pengembangan PTIK

PTIK merupakan satu-satunya lembaga (formal) di mana Ilmu Kepolisian dikembangkan. Karena itu, untuk pengembangan ilmu, PTIK mutlak harus dikembangkan. Pengembangan lembaga ini menyangkut dua aspek, yang pertama adalah program studinya, dan kedua adalah lembaganya sendiri.

1. Pengembangan Program Studi: Program Pasca Sarjana S2

Perkembangannya melalui jalan yang berliku-liku, dimulai dari program Kandidat Doktorat, berubah menjadi program Sarjana Muda-Doktoral, dan yang terakhir ialah Program Sarjana Strata 1 (S 1), dalam hal ini berlangsung selama 50 tahun ! (1946-1996). Dengan demikian materi dari ilmu yang dikembangkan juga terbatas pada tingkat yang diperlukan untuk pengetahuan strata 1. Sebenarnya keinginan untuk me-

ngembangkan ke Program Pasca Sarjana S2 sudah lama, namun baru akan bisa dilaksanakan dalam pertengahan tahun ini (1996) bertepatan peringatan ke-50 lahirnya PTIK. Dalam pelaksanaannya sekiranya perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain :

a. Data Awal

- 1). Ilmu Kepolisian pada saat ini masih berada pada tahap perkembangan mencari bentuk dan isinya secara nyata.
- 2). Sampai sekarang belum terdapat tenaga dosen berkualifikasi untuk program S2 Ilmu Kepolisian, ialah sarjana/ahli ilmu kepolisian minimal Strata 2. PTIK mempunyai banyak Guru Besar yang berkualitas dalam berbagai bidang ilmu, tetapi bukan dalam ilmu kepolisian.
- 3). Di kalangan Polri terdapat sejumlah personil yang sudah menyandang gelar S2 (Magister), namun dalam berbagai bidang antara lain manajemen, bisnis, ketahanan nasional, lingkungan, psikologi.

b. Bentuk Program :

Ada kemungkinan dalam bentuk :

- 1) *Program Studi Ilmu Kepolisian*
Program studi ini dimaksud untuk pendalaman dalam

menguasai Ilmu Kepolisian, di bawah asuhan para Dosen/Guru Besar yang menguasai Ilmu Kepolisian.

Mengingat akan data awal tersebut di atas, pada dewasa ini bentuk program ini belum bisa dilaksanakan.

2). Program Pengkajian Ilmu Kepolisian

Program ini sekarang paling layak (feasible), seperti Police Studies di Inggris, di mana para Guru Besar membimbing para peserta program di dalam pengkajian pendalaman beberapa aspek dari Sistemibmas, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari cabang-cabang ilmunya yang sudah ada. Dengan demikian juga akan mengarah kepada bentuk dan isi kepada Ilmu Kepolisian yang lebih nyata.

a). Diadakan Penjuruan

Untuk mencapai keahlian dalam penguasaan bidang-bidang tertentu diadakan jurusan-jurusan :

- A. Jurusan Administrasi.
- B. Jurusan Hukum.
- C. Jurusan Sosial Budaya.
- D. Jurusan Teknologi.

b). Pengangkatan Guru besar Ilmu Kepolisian

Para Guru Besar pembimbing diangkat menjadi Guru Besar dalam Ilmu Kepolisian.

Dengan demikian dipenuhi per-

syarat sebagai Program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian.

c). Mendatangkan ahli-ahli ilmu kepolisian sebagai Dosen Tamu, di antaranya dari Belanda (Politie Hooze School), Inggris (dari Bramshill), Police Studies, Amerika Serikat (dari Universitas yang mempunyai program studi bidang kepolisian) dan negara-negara yang lain, sesuai dengan saran Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar pada pidato Dies PTIK tahun 1981.

d). Peserta Program.

Pada angkatan pertama program ini, diutamakan :

- a. Dosen PTIK yang masih berstatus S1 dan yang berminat,
- b. Dosen alumni PTIK dan personil Polri yang sudah memiliki tingkat S2 dalam berbagai bidang ilmu.
- c. Peminat dari luar Polri yang sudah memiliki tingkat S2. Dengan pengikut program seperti demikian, mungkin pelaksanaan program ini bisa dipersingkat, dan juga untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang berkualitas akademis untuk program S1, dan juga menyiapkan para lulusan untuk bisa segera menempuh program S3.

e). Hasil kajian pada program untuk bisa dihimpun untuk menyempurnakan Ilmu Kepolisian, dan

kemudian dijadikan materi untuk adanya Program Studi Ilmu Kepolisian.

- f). Program Pasca Sarjana S2 ini kemudian hari bisa dilan-jutkan dengan program S3 (doktor), baik dengan mengadakan di PTIK sendiri ataupun mengirimkan para lulusannya melanjutkan di luar negeri.

2. Pengembangan PTIK/Lembaga

Pengembangan Lembaga PTIK diarahkan untuk mendukung pengembangan Ilmu Kepolisian, jadi sejalan dengan fungsi dari PTIK. Pengembangan di sini diartikan peningkatan mutu piranti-pirantinya yang langsung mempunyai dampak terhadap pengembangan ilmu.

Adapun yang perlu ditingkatkan adalah ;

- a. Mutu dari para Dosen dan Asisten Dosen, baik dalam penguasaan ilmu maupun dalam perannya masing-masing. Program pasca sarjana S2 akan sangat membantu mutu para dosen.
- b. Perbaikan di dalam penyusunan struktur kurikulum, baik mengenai jenis mata kuliah yang harus menunjukkan dominasi cabang-cabang ilmu kepolisian sebagai kurikulum inti, maupun beban studi yang tidak terlalu membebankan para mahasiswa, tetapi cukup memenuhi persyaratan jumlah kredit, baik untuk pro-

gram S1 maupun untuk program S2.

- c. Perbaiki sistem penulisan skripsi maupun sistem ujian, agar meningkatkan hasil (output) dari pendidikan.
- d. Kualitas Perpustakaan PTIK harus dikembangkan dengan pengadaan buku acuan maupun penerbitan berkala dalam bidang kepolisian dari luar negeri.
- e. Peran PPTIK beserta para tenaga Kelompok Ahlinya ditingkatkan terutama nanti untuk mendampingi Program S2, dengan mengajukan bahan untuk dikaji, turut dalam pembinaan penelitian, dan mengolah hasil kajian sebagai bahan untuk mempertinggi mutu ilmu.
- f. Majalah "Bhayangkara" sebagai majalah untuk Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian harus lebih meningkatkan mutunya, dengan tulisan-tulisan yang berbobot dalam bidang ilmu yang dibinanya.

Demikianlah perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, dimasa yang lampau dan dimasa datang yang diharapkan.

Catatan :

1. Prof. Dr. S Prajudi Atmosudirdjo, S.H., Pentingnya studi tentang Konflik Pidato Dies PTIK, 1976.
2. Ibid.

3. Hadi Saputro, Prof. Mr. Djoko-soetono, Pelopor Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia. Buku peringatan Prof. Djoko-soetono, S.H., Guru Pinandito, 1984.
 4. Drs. Moersaleh, M.Sc., Prof. Soenarjo Kolopaking, Bapak Penelitian Kepolisian, Pidato Dies PTIK 1969.
 5. Prof. Dr. Daud Jusuf., Pidato pelantikan Dekan PTIK, 1980, Buku Peringatan PTIK ke-35.
 6. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar., PTIK masa sekarang dan masa datang, Pidato Dies tahun 1981.
 7. Hadi Saputro, Perkembangan Ilmu Kepolisian, suatu studi perbandingan, Majalah Bhayangkara Edisi 14/1990.
 8. Dr. Cyrille Fijnaut, Over de traditie van de Politiewetenschap in West Europa. Nederlandse Politie Akademi : Theoretische Opstellen rondom de Politis, 1983.
 9. Drs. Moersaleh, M.Sc. Pidato Dies tahun 1969.
 10. Richard E. Sykes, A regulatory of Policing, dalam buku Bailey : Police and Society, 1977.
 11. Harsya W. Bachtiar, Ilmu Kepolisian, suatu cabang Ilmu Pengetahuan Baru, 1994.
 12. Prof. Dr. S. Prajudi Admosudir-djo, S.H., Pidato Dies PTIK tahun 1976 ; Soeparno Soeriaat-madja : Catatan Kuliah PTIK.
 13. Pfiffner, Administrative Organization, 1968.
 14. Hadi Saputro, Kerangka Teori Manajemen Kepolisian, Suatu Konsep, Majalah Bhayangkara No.11-12/1985.
 15. Prof. Dr. S. Prajudi Admosudir-djo S.H., Pidato Dies PTIK 1976.
 16. Hadi Saputro, Police Hazard, arti, pola-pola dan penanggulangannya, Majalah Bhayangkara 05/1988.
 17. Niderhofer, The Ambivalent force, 1976.
 18. Hadi Saputro, Identitas kepolisian, Suatu pendekatan manajerial Pendidikan, Pidato Dies PTIK 1982.
 19. Harsya W. Bachtiar, Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian, Pidato Dies 1994.
- Drs. Hadi Saputro**
 Mayor Jenderal Polisi (Purn).
 Tanggal lahir : 14 Juni 1923.
- Pendidikan :**
- AMS/SMA 1944
 - PTIK 1954
 - Universitas Michigan State 1956
 - Suskat Seskoad 1963
 - Kursus Pra Seskopol 1964
- Jabatan :**
1. Komando Wilayah

- Ka Polisi Daerah Bali 1955
- Ka Pol. Wil. Pati 1960
- Ka Pol. Kobes Medan 1963
- Kapolda Sumbar 1964

Komando Fungsional

- Kasat Serse Jateng 1959
- Gubernur PTIK 1970
- Danjen Kobangdiklat 1975

2. Staf

- Ka Staf Komando Sumatra 1965
- Spri Kapolri 1976

3. Karyawan

- Wakil Dekan PTIK 1978
- Dosen PTIK 1987

